

EVALUASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Hany Amalia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

Abstract: The purpose of this study was to determine the performance evaluation of the public works department and spatial planning in the Dumai city drainage development program. In addition, what are the factors influence the performance evaluation of the public works department and spatial planning in the Dumai city drainage development program. This study uses a qualitative descriptive research method approach. Primary data is obtained directly through interviews with informants. Namely the head of the creative work division, the head of the sanitation section of the residential environment and drinking water and the community. The results of this study indicate that the implementation of performance evaluation of the public works department and spatial planning in the Dumai city drainage development program has not achieved maximum results. Where in its implementation quality human resources are still limited, inadequate budget and lack of public awareness in maintaining and maintaining drainage facilities and infrastructure are the causes for the drainage development program that has been implemented by the public works and spatial planning agency has not been felt of any benefit.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai serta apa saja faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari *informan*, yaitu Kepala Bidang Cipta Karya, Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai belum mencapai hasil yang maksimal, dimana dalam pelaksanaannya sumber daya manusia yang berkualitas masih terbatas, anggaran yang kurang memadai dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana drainase menjadi sebab program pembangunan drainase yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang dirasakan manfaatnya.

Kata kunci: Kinerja organisasi, evaluasi kinerja, pembangunan drainase

PENDAHULUAN

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Saat ini drainase sudah menjadi salah satu infrastruktur perkotaan yang sangat penting. Kualitas manajemen suatu kota tercermin dari kualitas drainase di kota tersebut.

Seiring perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk mengakibatkan banyaknya bangunan baru di Kota Dumai. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan penataan sistem drainase yang baik pula. Hal ini bisa dilihat dari kondisinya hampir setiap drainase yang ada di Kota Dumai banyak dipenuhi sampah dan sistem drainase yang ada masih kurang tertata dan kurang terpelihara sesuai dengan standar yang ada sehingga munculnya daerah genangan air

hujan dan banjir. Sistem drainase yang kurang baik menyebabkan terjadinya genangan air di berbagai tempat sehingga bukan hanya menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu kegiatan transportasi, perekonomian dan lain-lain.

Berbagai permasalahan drainase di Kota Dumai diantaranya adalah pembangunan saluran sekunder kota belum merata sehingga masih terjadi banjir dan genangan air (pasang keling). Masih banyak jalan lingkungan yang tidak memiliki drainase khususnya di lingkungan permukiman kumuh perkotaan. Dimensi saluran lingkungan banyak yang tidak standar (terlalu kecil) dan sebagian lainnya tersumbat oleh sampah dan tanaman sehingga air menghitam dan menimbulkan bau. Sebagian besar jaringan drainase lingkungan belum terkoneksi jaringan sekunder kota. Pembangunan saluran sekunder kota kurang memperhatikan elevasi dan arah

aliran air sehingga masih terjadi genangan baik di saluran sekunder kota maupun saluran drainase lingkungan. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran drainase, baik saluran perkotaan maupun di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Dinas PUPR Kota Dumai merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase lingkungan dan perkotaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Pasal 4 ayat 3 berbunyi: *“Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya”*. Dinas PUPR memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase. Hal tersebut dikarenakan salah satu tupoksi dari Dinas PUPR adalah melaksanakan penyiapan, kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan pengendalian, pemeliharaan/perbaikan, pengawasan dan evaluasi drainase perkotaan, sampah dan limbah, air minum dan penataan bangunan. Tupoksi tersebut dilaksanakan oleh salah satu bidang yakni bidang cipta karya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PUPR Kota Dumai. Pelaksanaan tugas pokok tersebut dilaksanakan sesuai dengan fungsi Dinas PUPR Kota Dumai yang meliputi perencanaan (program dan teknis), pengawasan, pengendalian, pembangunan, dan pemeliharaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas PUPR Kota Dumai yakni dengan meningkatkan kapasitas sarana prasarana drainase melalui pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong serta rehabilitasi sarana prasarana untuk pengendalian banjir. Namun upaya tersebut sepertinya belum mampu mengatasi banjir yang ada di Kota Dumai karena sampai saat ini masih banyak kawasan yang mengalami genangan air. Buruknya sarana prasarana drainase juga

membawa konsekuensi terhadap terjadinya permasalahan banjir yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai dan faktor-faktor apa saja yang menghambat evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase di Kota Dumai.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Alasan penulis memilih jenis penelitian ini adalah: Pertama, penulis berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Kedua, pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dan responden. Penulis datang ke masyarakat yang ditelitinya, *setting*, *site*, atau institusi untuk mengamati serta merekap perilaku masyarakat yang ditelitinya dalam *setting* alaminya. Ketiga, penulis menitikberatkan studinya pada indentifikasi bagaimana proses yang terjadi dalam suatu lembaga, kelompok, atau individu. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh informan penelitian dengan cara teknik pengambilan sumber data *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur analisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar hasil evaluasi tersebut dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangu-

nan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai.

Pemantauan perlu pula dilakukan agar pelaksanaan pembangunan yang menyimpang dan bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan dapat segera diambil langkah-langkah yang sesuai. Penyimpangan dan pergeseran tersebut dapat berupa: sasaran yang tidak tercapai, sasaran yang terlampaui, ada peralihan dari satu sasaran ke sasaran lainnya. Dikaitkan dengan program pembangunan drainase di Kota Dumai, adalah menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pengendali manajemen pembangunan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan tersebut, serta mengambil langkah-langkah apabila diperlukan perubahan/revisi dalam pelaksanaan pembangunan.

Proses pembangunan drainase/gorong-gorong dilakukan melalui usulan yang dimulai dari masyarakat, pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan, dan internal pemerintahan, lalu ke Dinas PUPR yang dibahas dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang biasanya dilakukan setahun sekali. Hasil dari Musrenbang akan diajukan dan dibahas Dinas PUPR bersama Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Lalu hasil dari keputusan dibahas bersama panitia anggaran (Setda, Bappeda, penyusun program Dinas PUPR). Kemudian dibuat skala prioritas program yang menghasilkan keputusan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Selanjutnya RKA diajukan oleh Setda ke DPRD untuk disaring kemudian ditetapkan dan disahkan dalam anggaran daerah. Pembangunan drainase dilakukan dengan memanfaatkan kapasitas pendanaan yang ada. Pendanaan program pembangunan drainase/gorong-gorong berasal dari APBD Kota Dumai. Penggunaan dana APBD yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan drainase akan disesuaikan dengan skala prioritas. Penggunaan pendanaan pembangunan dilakukan secara optimal dengan menggunakan kaidah-kaidah sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan pendanaan pembangunan yaitu dengan fokus

meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas melalui proyek prioritas dan integrasi pendanaan yang dilakukan dengan beberapa langkah yaitu: mengutamakan alokasi pada prioritas, mengalokasikan sumber dana yang terbatas dengan mendahulukan kegiatan atau proyek yang menjadi prioritas daerah. Pendanaan pembangunan diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan nasional dimana fokus alokasi anggaran adalah pendanaan prioritas pembangunan terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan dana APBD untuk pembangunan drainase tidak dapat dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada urgensi drainase pada wilayah tertentu. Urgensi yang dimaksud misalnya seperti separah apa kerusakan yang terjadi pada drainase dan sesuai dengan fungsi drainase yang akan mempengaruhi intensitas kegiatan masyarakat.

Kriteria Masukan (Input)

Kriteria masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana dan sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah diterapkan.

Salah satu tugas pemerintah adalah memastikan ketersediaan dan kesiapan SDM untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Dumai, Dinas PUPR merupakan salah satu tulang punggung penyediaan infrastruktur yang membutuhkan SDM yang unggul dan dapat diandalkan, handal dan profesional, serta berintegritas, dengan selalu berprinsip pada nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dalam membangun drainase, pihak yang terlibat dalam proses pembangunan dituntut untuk memiliki keterampilan yang baik. Faktor keterampilan sangat menentukan tingkat pencapaian kinerja.

Pihak Dinas PUPR Kota Dumai terus berusaha meningkatkan kinerja pegawainya dengan mendapatkan pelatihan dan pendidikan terkait dengan sistem drainase. Hal ini dilakukan mengingat penguasaan terhadap teknik pelaksanaan konstruksi drainase dengan memperhatikan kualitas dan tetap menjaga spesifikasi konstruksi yang sesuai dengan aturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan sangat penting. Dengan demikian konstruksi drainase yang sudah dibuat dapat bertahan cukup lama dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. SDM merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan.

Kriteria Keluaran (Outputs)

Kriteria keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Dengan membandingkan keluaran instansi dapat menganalisis apakah suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Tetapi indikator kinerja harus dibandingkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan teratur. Jadi, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.

Dalam pelaksanaan pembangunan drainase, Dinas PUPR telah dapat memaksimalkan pencapaian program kegiatan yang telah direncanakan. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala seperti terbatasnya lahan untuk pembangunan, waktu pelaksanaan pembangunan, biaya dan mutu, disamping profesionalitas dari aparatur yang terkait satu dengan lainnya sehingga komponen waktu, biaya dan mutu perlu dikelola secara menyeluruh dan lebih terpadu. Pencapaian persyaratan mutu sesuai spesifikasi pada tingkatan memuaskan masyarakat Kota Dumai pada umumnya menjadi hal yang terpenting, karena sesudah suatu proyek dilaksanakan, penilaian biasanya ditekankan pada masalah kualitas (mutu), penampakan penyelesaian akhir suatu pekerjaan (*finishing*) yang juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Penerimaan

kuantitas pekerjaan pada umumnya didasarkan atas pemenuhan persyaratan sesuai spesifikasi. Namun demikian, kendala maupun kelemahan-kelemahan yang ada dijadikan sebagai pemicu dan pemacu untuk meningkatkan kinerja aparatur Dinas PUPR khususnya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

Kriteria Hasil (Outcomes)

Kriteria hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Untuk mewujudkan pelayanan prima, Dinas PUPR telah merumuskan program-program kegiatan dengan mengoptimalkan berbagai sarana prasarana penunjang pembangunan daerah. Salah satu program kegiatan agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat tersebut adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar secara layak yaitu dengan pembangunan drainase karena prasyarat kondisi kawasan yang layak, bersih dan sehat adalah apabila drainasenya baik dan terstruktur.

Upaya Dinas PUPR dalam rangka penanggulangan banjir di Kota Dumai dalam bentuk program pembangunan drainase/gorong-gorong dan pemeliharaannya untuk memenuhi hak dasar rakyat terus dilakukan namun belum dapat optimal memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kritik masyarakat terhadap program pembangunan drainase yang dilaksanakan. Masalah rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur drainase hadir karena pembangunan drainase yang dilakukan tidak berfungsi secara optimal dan belum terintegasi dengan baik serta masih banyak drainase lingkungan yang belum ada dan sebagiannya masih berupa parit

alam. Sehingga belum semua masyarakat Kota Dumai dapat menikmati hasil pembangunan.

Untuk menjamin lancarnya aktifitas masyarakat Kota Dumai dari genangan dan bahaya banjir tersebut maka diperlukan pengelolaan terhadap pengaliran air dengan memperhitungkan antara besarnya kapasitas air yang akan melimpas dengan kemampuan saluran-saluran yang menghantarkan aliran air dari daratan menuju badan air. Sehingga sebelum dilakukan pembangunan drainase diperlukan perencanaan pembangunan yang matang dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pembangunan drainase untuk meminimalisir banjir tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, tetapi harus dilaksanakan dalam sistem yang menyeluruh dan terpadu mulai dari hulu hingga hilir.

Kriteria Manfaat (Benefits)

Kriteria manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

Pembangunan drainase yang dilakukan Dinas PUPR telah memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Dumai. Namun demikian, manfaat yang dirasakan dari adanya pembangunan drainase belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai. Masyarakat merasa bahwa kualitas kinerja aparat pemerintah dinilai belum maksimal dan manfaat yang didapat masyarakat belum merata. Hal ini dikarenakan banyaknya drainase yang sudah tidak mampu mengalirkan debit air yang disebabkan oleh intensitas hujan dan pasang air laut yang tinggi akibat dimensi saluran drainase yang tidak memadai khususnya di lingkungan permukiman kumuh perkotaan sehingga masih terjadi banjir dan genangan air. Hal ini diperparah dengan buruknya kualitas pekerjaan konstruksi pada saluran drainase sehingga banyaknya saluran drainase dengan kondisi yang tidak layak.

Adapun yang menjadi penyebab dari rendahnya kualitas pekerjaan tersebut diantaranya adalah :

1. Pihak rekanan/CV sebagai pelaksana pekerjaan mengabaikan atau tidak memperhatikan standar mutu pekerjaan demi mengejar keuntungan, diantaranya pemakaian bahan material yang murah dan rendah kualitas.
2. Pihak rekanan/CV tidak memperhatikan batas waktu kontrak pekerjaan, sehingga ketika waktu kontrak akan berakhir mereka buru-buru akan mengerjakan. Hal ini disebabkan pihak rekanan/CV mengerjakan lebih dari satu paket pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya kualitas pekerjaan kurang maksimal.
3. ASN yang bertugas sebagai pengawas pekerjaan telalu overload terhadap jumlah paket pekerjaan yang diawasi, akibatnya pengawasan kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena minimnya jumlah ASN yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi proyek pembangunan di lapangan sehingga hasil pengawasan kurang maksimal.

Guna merespon kondisi tersebut, Dinas PUPR Kota Dumai telah mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan bidang PUPR dalam hal pengendalian banjir. Bentuk kebijakan tersebut berupa perencanaan pembangunan drainase yang lebih terpadu dan terarah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sehingga dapat mengantisipasi berbagai hal, salah satunya terbatasnya APBN untuk pembangunan infrastruktur agar seluruh sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang.

Kriteria Dampak (Impacts)

Kriteria dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Indikator ini sulit diukur karena memerlukan waktu lebih dari satu periode untuk mengetahui dampaknya. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak

langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Program pembangunan drainase yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Dumai sudah berjalan dengan baik. Namun, hal itu belum memberikan dampak yang besar di beberapa daerah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya daerah yang tergenang air ketika musim hujan datang akibat permasalahan drainase yang ada. Meskipun setiap tahun drainase dibuat, tetap saja ketika musim hujan tiba, terjadi genangan air. Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah karena dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan para korban, seperti: terendamnya rumah sehingga terjadinya kerusakan pada barang-barang yang ada di dalamnya bahkan bisa menyebabkan kehilangan barang-barang berharga lainnya.

Selain itu, terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa saat kondisi ini melanda. Para korban akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi karena mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Musibah ini menimbulkan kerugian kepada masyarakat korban dari sisi ekonomi. Di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Aktivitas perekonomian lumpuh akibat akses yang terputus. Banjir yang kerap terjadi ini biasanya juga sering merusak sebagian infrastruktur, fasilitas pelayanan sosial, ekonomi, dan prasarana publik. Tidak hanya masyarakat namun juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami kerugian akibat jalan yang rusak. Fasilitas umum, sarana prasarana yang rusak. Di samping kerugian yang bersifat material, banjir juga membawa kerugian non material, antara lain kerawanan sosial, wabah penyakit, menurunnya kenyamanan lingkungan, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat kegiatan perekonomian mereka terhambat.

Untuk itu, perlu penataan drainase kota yang

baik, serta ada keterhubungan antara drainase lingkungan dengan drainase sistem kota. Begitu pula kualitas konstruksi, perlu ditingkatkan. Selanjutnya Penyediaan infrastruktur drainase harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga dalam jangka panjang keberadaan drainase tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran

Pendanaan terutama berkaitan dengan terbatasnya sumber pendanaan pemerintah dan rendahnya alokasi APBD yang merupakan akibat dari rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan drainase baik dari segi pembangunan maupun biaya operasi dan pemeliharaan drainase di Kota Dumai.

Tabel 1. Anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase

Sumber Dana	Program/ Kegiatan	
	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong
APBD Tahun 2017	1,932,375,000	1,304,566,800
APBD-P Tahun 2017	2,130,025,000	1,304,566,800
APBD Tahun 2018	3,216,024,600	1,942,179,775
APBD-P Tahun 2018	2,836,024,600	1,942,179,775
APBD Tahun 2019	4,547,125,950	3,143,451,200
APBD-P Tahun 2019	4,556,907,950	2,891,401,200

Sumber: Bappeda Kota Dumai

Dinas PUPR Kota Dumai sudah pasti mengalokasikan sejumlah dana untuk kepentingan pembangunan drainase. Dari data tersebut dapat

dilihat bahwa anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan drainase setiap tahunnya terus meningkat. Namun, mengingat begitu banyaknya drainase yang harus dibangun dan diperbaiki serta kerusakan yang kerap terjadi di beberapa ruas jalan mengakibatkan timbulnya ketidakseimbangan antara alokasi dana yang diberikan dengan banyaknya drainase yang harus diurus. Kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat sedangkan sumber dana publik terbatas berdampak pada buruknya kualitas pengelolaan drainase perkotaan. Dana yang sangat terbatas harus dibagi untuk pembangunan saluran baru, normalisasi saluran, revitalisasi saluran, perencanaan dan pengawasan. Keterbatasan dana sehingga berpengaruh terhadap operasional pemeliharaan prasarana drainase tidak berjalan maksimal. Ketersediaan dana yang lebih akan membuat pengelolaan sistem drainase perkotaan menjadi lebih baik.

Kesadaran Masyarakat

Penanganan masalah sistem drainase (khususnya sampah yang ada pada drainase) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pelaku usaha dan masyarakat umum sebagai produsen sampah juga memiliki tanggung jawab dalam menangani masalah sampah. Hal ini menunjukkan bahwa antara pemerintah dan masyarakat umum serta pelaku usaha harus bekerjasama dalam menangani masalah sampah.

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase, sikap dan cara hidup masyarakat yang masih belum peduli terhadap perawatan saluran dan kebersihan lingkungan, maupun penutupan saluran drainase dan pengalihan fungsi saluran drainase sebagai bangunan, kolam ikan dll. Keadaan tersebut diperburuk karena banyak drainase lingkungan yang beralih fungsi sebagai penampungan limbah rumah tangga sehingga menyebabkan pencemaran terlebih lagi sampah-sampah rumah tangga menjadi salah satu penyebab penyumbatan drainase yang mengganggu dan menghambat aliran air.

SIMPULAN

Evaluasi kinerja Dinas PUPR dalam program pembangunan drainase Kota Dumai adalah belum baik. Hal ini disebabkan terbatasnya SDM yang mampu melaksanakan pembangunan bidang drainase, kualifikasi dan jenis keahlian pegawai, perimbangan beban kerja dan jumlah tenaga kerja serta anggaran yang kurang memadai mengidentifikasi bahwa adanya kondisi internal yang merupakan kelemahan bagi Dinas PUPR Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan drainase yang ada di Kota Dumai mulai dari saluran drainase yang tidak berfungsi, tata alir belum tertata secara baik, kapasitas saluran drainase berkurang/tidak mencukupi yang disebabkan pendangkalan saluran dan gorong-gorong tersumbat sehingga menyebabkan saluran drainase tidak mampu menampung debit air yang datang dan juga kebiasaan sebagian masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase.

DAFTAR RUJUKAN

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fawahid, Ahmad. 2016. *Manajemen Perkotaan (Studi Kasus Penataan Drainase di Kota Pekanbaru)*
- Fairizi, Dimitri. 2015. *Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang*
- Muttaqin, Adi Yusuf. 2007. *Kinerja Sistem Drainase yang Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat*
- Nurhamidin, Achmad Erwin. 2015. *Analisis Sistem Drainase Kota Tondano (Studi Kasus Kompleks Kantor Bupati Minahasa)*
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Pebriana. 2015. *Penataan Infrastruktur Drainase di Kota Pekanbaru*
- Ruky, S. Achmad. 2001. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Gramedia.
- Siagian, P. Sondang. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YPKN.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Veithzal Rivai. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Yani, M. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.